

TERJERAT KUITANSI JALAN TOL WARU

Djadja Suparman didakwa menggangsir uang ganti rugi tanah Kodam Brawijaya senilai Rp 17,6 miliar. Kesaksian mantan anak buah semakin menyudutkan purnawirawan letnan jenderal itu.

DJADJA Suparman duduk gelisah di kursi terdakwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Ia terlihat sering menggelengkan kepala sambil bergumam. Matanya tak lepas menatap Sujarwo, yang saat itu tengah bersaksi pada Selasa dua pekan lalu. Sesekali pria 65 tahun ini menimpali omongan Sujarwo, yang sering mengatakan lupa dan tidak tahu. Djadja meminta Sujarwo jujur. Hakim yang melihat kegusaran Djadja akhirnya angkat bicara. "Terdakwa tidak usah mengomentari jawaban saksi," kata Marsesal Madya Sinoeng Hardijanti, salah seorang anggota majelis hakim. Djadja patuh dan kembali khusyuk mendengarkan kesaksian Sujarwo.

Pengadilan militer menggelar sidang Djadja sejak 22 April lalu. Purnawirawan bintang tiga ini didakwa menggangsir uang ganti rugi tanah Komando Daerah Militer Brawijaya, Jawa Timur, di Kelurahan Dukuh Menanggal, Surabaya, pada 1998. Tanah itu digunakan sebagai perlintasan jalan tol Waru-Tanjung Perak. Saat itu, Djadja menjabat Panglima Kodam Brawijaya. Di dalam dakwaan, sebagian tanah dihibahkan kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), operator jalan tol. Perusahaan yang dulu milik Sidi Hardijanti Rukmana alias Tutut ini memberikan uang ganti rugi Rp 17,6 miliar. Uang itu yang kini dipermasalahkan oditur militer karena dianggap tak jelas pertanggungjawabannya.

Sujarwo, yang kini sudah pensiun dengan pangkat kolonel, kala itu menjabat Asisten Logistik Kodam Brawijaya. Ia dianggap tahu banyak peristiwa hibah itu. Oditur militer Letnan Jenderal Sumartono dan ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao mempertanyakan status tanah seluas 20 hektare di Pasrepan, Pasuruan. Lahan itu kini ditanami tebu, seseka-

li melon. Sujarwo berdalih tak tahu banyak karena menjabat asisten logistik di pengujung masa jabatan Djadja pada 1998. "Tanah di Pasrepan tak dimasukkan ke daftar kasus oleh pejabat sebelumnya," ujarnya.

Keberadaan tanah ini penting karena hibah tanah Kodam Brawijaya itu lebih mirip disebut tukar guling. Pada 1996, dimulai pembangunan jalan tol Simpang Susun Waru ke Tanjung Perak sepanjang 26 kilometer. Jalan ini rencananya menyatu dengan Tol Lingkar Luar Timur Surabaya hingga menuju Jembatan Suramadu. Jalan tol ini melintasi sebagian 8,8 hektare tanah yang dikuasai Kodam Brawijaya di Dukuh Menanggal. Tanah itu sebenarnya milik pemerintah Jawa Timur, tapi sudah berpuh tahun dikelola Kodam.

Proyek ini sempat tujuh tahun mangkrak karena terimbas krisis moneter dan terganjal pembebasan tanah. PT CMNP pada 2006 menggugat perdata Kodam Brawijaya karena tak kunjung menerima sertifikat tanah. Dari sini, Inspektorat Jenderal Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, jabatan yang ditinggalkan Djadja pada Desember 2005 karena pensiun, mencium ada yang tak beres. Sejumlah perwira dikirim ke Surabaya untuk menginvestigasi. Belakangan mereka menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan. Hasilnya, auditor menemukan ada uang Rp 17,6 miliar dari PT CMNP ke Kodam Brawijaya.

Duit itu diserahkan PT CMNP pada 1998, diduga sebagai kompensasi pengalihan hak pengolahan tanah dari Kodam. Sebagian uang digunakan untuk merenovasi markas Kodam dan Batalion Kompi C Tuban, membangun gedung perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta, merenovasi kantor Yayasan Kartika Jaya, Balai Kartika, dan memasang pagar di balai tersebut. Sebagian lagi buat membeli tanah 20 hektare di Pasrepan-tanah yang diributkan di pengadilan tadi.

Karena tanah diganti dengan tanah, kasus ini mirip tukar guling. Nilai pembangunan dan perbaikan serta tukar guling itu diprediksi hanya senilai Rp 4,3 miliar. Sisa uang itu, Rp 13,3 miliar, dianggap raib.

Djadja orang yang paling bertanggung jawab atas raibnya uang itu. Apalagi *ruil-slag* tak boleh terjadi antara lembaga pemerintah dan swasta. Oditur militer menjerat Djadja dengan Pasal 28 dan 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembebarantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam 20 tahun penjara.

Djadja menjabat Panglima Kodam Brawijaya hingga pertengahan 1998. Setelah itu, ia menjadi Panglima Kodam Jaya, lalu Panglima Komando Angkatan Strategis Angkatan Darat. Selama itu tak ada yang memper-



Karena tanah diganti dengan tanah, kasus ini mirip tukar guling. Nilai pembangunan dan perbaikan serta tukar guling itu diprediksi hanya senilai Rp 4,3 miliar. Sisa uang itu, Rp 13,3 miliar, dianggap raib.

pu makelar," ujarnya.

Itu sebabnya Djadja mengadukan Dwi Putranto ke Kepolisian Daerah Jawa Timur bulan lalu atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Ia baru tahu namanya dicatat setelah melihat kuitansi senilai Rp 17,6 miliar yang diajukan oditur militer. Kuitansi itu jadi barang bukti. Dwi sekarang entah di mana. Dia tak ikut bersaksi dalam kasus Djadja. Sumber *Tempo* mengatakan Dwi dikenal sebagai makelar tanah yang sudah banyak menipu orang. "Banyak jenderal sudah menjadi korbannya," kata sumber itu.

Di sidang berikutnya, tim pengacara Djadja berencana mengundang Wiranto dan Subagyo Hadi Siswoyo. Kesaksian mantan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat ini, menurut pengacara Djadja, Heru Samiadji, diharapkan bisa meringankan kliennya. Rencananya keduanya akan bersaksi setelah Lebaran. Dalam proses peralihan tanah ini, Djadja mengklaim sudah mendapat restu kedua atasannya itu. "Keduanya sudah memastikan akan hadir menjadi saksi meringankan," ujar Heru.

Jalan tol Simpang Susun Waru yang juga melintasi Bandar Udara Juanda itu kini tak seramai perkiraan. Panjang jalannya pun disunat menjadi 12,8 kilometer. Tak banyak kendaraan yang menggunakan jalan tol itu. Jarang terlihat antrean mengular di pintu tol, kecuali pada hari raya. Sehari-hari masyarakat lebih suka menggunakan jalan umum ketimbang jalan tol yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lima tahun lalu ini. Berbanding terbalik dengan jalan raya di sebelahnya, yang selalu dipadati kendaraan.

● MUSTAFA SILALARI (JAKARTA), KUKUH S. WIRDWO, DAVID PRIYASIHARTA (SURABAYA)

masalahkan kasus ini. Kasus "meledak" saat Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat pada 2006 memanggil Djadja, yang saat itu sudah purnabakti. Hadir pula di sana para petinggi TNI. Meski pertemuan itu berjalan tertutup, isi pertemuan menyebar di kalangan wartawan. "Saya yang meminta kepada DPR agar rapat itu berjalan tertutup," ucap Djadja. Alasannya, kata dia, karena tak mau kasus ini menjadi ramal dan ia dituduh melakukan korupsi.

Di pengadilan, peraih Bintang Maha Putra Utama—penghargaan bagi orang yang berjasa menyelamatkan negara karena dianggap meredam kerusuhan 1998 di Jakarta—ini semakin tersudut dengan kesaksian mantan anak buahnya. Maskup, mantan Kepala Zeni Kodam Brawijaya, di peng-

Tanah ruilslag di ruas jalan tol Waru, Surabaya.

adilan mengatakan ia melihat sendiri Dwi Putranto, makelar tanah, menitipkan uang Rp 17,6 miliar ke Kodam dalam berbagai kesempatan. Di sana ada kuitansi serah-terima uang. "Uang itu tidak masuk ke kas Kodam," ujar pensiunan kolonel ini saat di persidangan.

Djadja melawan kesaksian ini. Ia mengatakan, dari 21 saksi yang diajukan di pengadilan, hanya 8 orang yang ia anggap layak karena menjabat saat peristiwa itu terjadi. Bapak dua anak ini mengatakan tak pernah menandatangani kuitansi ganti rugi tanah itu. Dokumen jual-beli yang diperoleh pengadilan, kata dia, ganjil. "Saya diti-

LETNAN JENDERAL PURNAWIRAWAN DJADJA SUPARMAN:

SISA UANG SAYA BAGIKAN KE PRAJURIT

PENSIUN ternyata tidak membuat Djadja Suparman bisa bersantai. Berhenti dari dinas militer pada 2006, beberapa saat kemudian dia ditetapkan jadi tersangka. Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya periode 1997-1998 ini didakwa kasus korupsi tanah milik tentara. Status ini pula, kata dia, yang membuat relasi bisnisnya menajuh. "Saat ini keinginan saya cuma satu: kasus ini segera selesai," ujar pria 65 tahun ini. Sejak April lalu, ia bolak-balik Jakarta-Surabaya menghadiri sidanginya di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Jumat pekan lalu, *Tempo* menemui purnawirawan letnan jenderal ini di rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Djadja tinggal di rumah itu bersama istri dan dua putri mereka. Sebelumnya mereka tinggal di Jakarta Timur. Ia memindahkan keluarganya karena maling menyatroni rumah lamanya. Menurut Djadja, kawanan pencuri itu juga membawa kabur laptopnya yang berisi data kasus korupsi yang membelitnya. Berikut ini petikan wawancara wartawan *Tempo*, Mustafa Silalahi, dengan Djadja Suparman.

Apa benar uang Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) untuk ganti rugi tanah Kodam Brawijaya?

Tidak benar. PT CMNP tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 17,6 miliar untuk ganti rugi tanah Kodam Brawijaya yang terkena jalan tol, baik secara langsung maupun tidak langsung, tunai atau cek, maupun transfer. Sebab, tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara Kodam dan PT CMNP tentang adanya ganti rugi atas tanah itu, baik secara lisan maupun tertulis.

Lalu itu uang apa?

Direksi PT CMNP mengeluarkan kebijakan untuk membantu Kodam. Jadi uang itu murni bantuan dari PT CMNP dan tidak terkait dengan masalah tanah. Keterangan ini diperkuat kesaksian Eko Yuwono, Sandi Soko Hawono, dan Beny Hakim di pengadilan pada 16-17 Mei lalu. Mereka dari PT



Uang itu digunakan untuk membangun dan merenovasi markas Kodam Brawijaya dan bangunan pendukung lain serta buat membeli tanah. Ingat, ini uang bantuan yang kalau hilang pun tidak ada masalah karena bukan uang negara.

CMNP. Masalahnya, uang itu diserahkan kepada Dwi Putranto. Dia mengaku orang kepercayaan saya, padahal makelar. Kuitansi uang itu ia rekayasa seolah-olah uang tersebut hasil jual-beli tanah Kodam.

Ke mana saja uang itu digunakan?

Uang itu digunakan untuk membangun dan merenovasi markas Kodam Brawijaya dan bangunan pendukung lain serta buat membeli tanah. Ingat, ini uang bantuan yang kalau hilang pun tidak ada masalah karena bukan uang negara. Tak ada yang masuk ke kas Kodam. Memang ada sisa uang sekitar Rp 4,7 miliar dari bantuan itu. Saya melapor ke KSAD, yang saat itu dijabat Subagyo Hadi Siswoyo. Saya minta izin uang itu dibagikan kepada seluruh prajurit Kodam, dan disetujui.

Jadi mengapa tanah itu beralih ke PT CMNP?

Ha-ha-ha.... Kata siapa tanah itu sudah beralih tangan? Tanah itu hingga sekarang masih milik Kodam. Makanya salah kalau ada yang bilang tanah itu telah di-*ruiislag*. Apalagi sampai membawa restu Pangdam. Yang terjadi, PT CMNP mengajukan permohonan meminjam tanah untuk persiapan pembangunan proyek jalan tol Waru-Tanjung Perak di lokasi tanah Kodam. Tanah ini milik yang sudah disiapkan untuk kepentingan jalan tol.

Jadi bukan surat izin membangun jalan tol di atas tanah itu?

Bukan. Entah kenapa kemudian di tanah itu berdiri tiang-tiang jalan tol.

Mengapa Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada penyimpangan di tanah itu?

Saya juga tidak tahu. Karena itu, BPK juga mesti ditanya, atas dasar apa laporan mereka menyebutkan ada *ruiislag* di tanah tersebut, dan ada kerugian negara. Faktanya tidak ada. Toh, itu dana bantuan dan tanah tersebut masih atas nama Kodam.

Anda tak bisa mengelak karena pengadilan punya kuitansi dengan tanda tangan Anda untuk proses ganti rugi itu.

Di kuitansi itu ada tanda tangan saya, tapi di situ bukan tentang penyerahan dana, melainkan jual-beli tanah. Itu pasti ada permainan. Saya tak tahu ada kalimat seperti itu. Katanya CMNP yang memberikan bantuan, kok di kuitansi itu tertulis, "Terima dari tim tanah untuk pembayaran jual-beli tanah." Berarti ada yang menjual tanah Kodam tanpa setahu saya. Sebab, saya tak pernah memerintahkan ada jual-beli. Saya bingung dari mana makelar-makelar itu mendapat cap dan kuitansi tersebut. ●